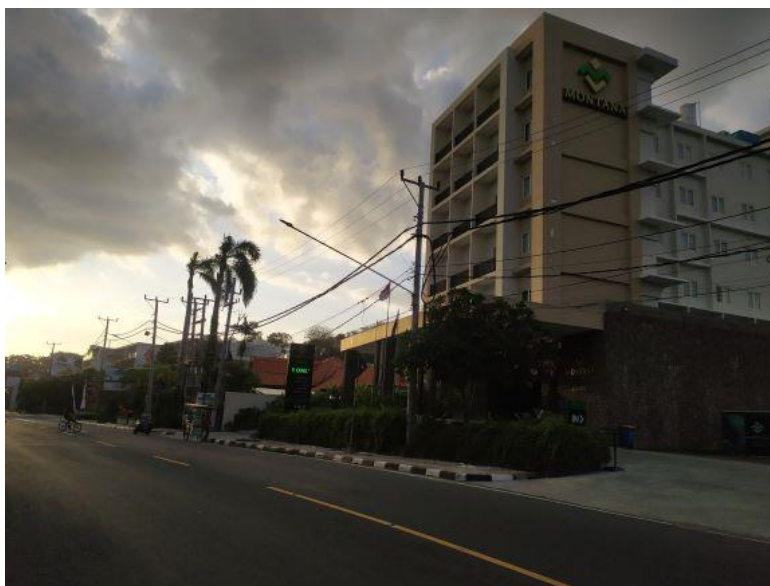


## 2021 Target PAD Lombok Barat Rp 293 Miliar



Sumber gambar: [www.lombokpost.jawapos.com](http://www.lombokpost.jawapos.com)

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp 42 miliar tahun 2021. “PAD pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 293,112 miliar,” kata juru bicara Badan Anggaran DPRD Lobar Abubakar Abdullah (20/11) lalu. Sebelumnya, tahun 2020 awalnya PAD Lobar ditargetkan Rp 274 miliar. Namun karena Covid-19 target PAD 2020 diubah menjadi Rp 251 miliar. Wakil Bupati Lobar Hj Sumiatun mengatakan, pandemi covid-19 telah berdampak kepada rancangan kebijakan umum APBD. Baik itu kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian. “Kita berasumsi pandemi covid-19 dapat berakhir tahun 2020. Sehingga skenario agenda pemulihan ekonomi setelah covid-19 sebagai bagian penting dalam rangka ekonomi makro tahun 2021,” katanya. Dia mengatakan, penyusunan APBD untuk tahun 2021 berbeda dengan sebelumnya. Dikarenakan harus mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Baik karena ada revisi maupun terbitnya regulasi baru Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Permandagri No 70 Tahun 2019. “Sesuai dengan kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif bersama-sama saling memberikan dukungan dan kontribusi. Mulai dari proses perencanaan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi,” kata dia. (nur/r3)

**Sumber Berita:**

<https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/22/11/2020/2021-target-pad-lombok-barat-rp-293-miliar/> .Diakses pada tanggal 25 November 2020

**Catatan Berita:**

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
  - a. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
  - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
    - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - hasil kerja sama daerah;
    - jasa giro;
    - hasil pengelolaan dana bergulir;
    - pendapatan bunga;

- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - pendapatan denda pajak daerah;
  - pendapatan denda retribusi daerah;
  - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - pendapatan dari pengembalian;
  - pendapatan dari BLUD; dan
  - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pendapatan transfer; dan
  3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah